

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST ~~SEPT~~ OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 75

TAHUN 2006

'3 Bank BUMN danai PLTU Tanjung Kasam'

BISNIS INDONESIA

BATAM: Proyek pembangunan PLTU Tanjung Kasam, Batam yang menelan dana US\$96,99 juta kemungkinan akan didanai oleh tiga bank nasional, yakni BNI selaku *lead arranger* bersama dengan Bank Mandiri dan BRI.

Hal itu diungkapkan Dirut PT PLN Batam Eri Ifyandri dalam pidatonya saat peletakan batu pertama pengerjaan proyek, belum lama ini.

Pernyataan ini ditegaskan kembali oleh Ketua Tim pengerjaan proyek PLTU Tanjung Kasam dari PT PLN Batam Binarto kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Hal ini dilakukan setelah pi-

hak Dongfang Electric Corporation, perusahaan asal China yang memenangkan tender tersebut, tidak dapat mengantongi *bank of guarantee* dari pemerintah Indonesia yang diupayakan PLN Batam. Selanjutnya jaminan pihak ketiga yang diusahakan PLN Batam juga tidak dapat dipenuhi.

Padaحال syarat itu yang diminta oleh Bank of China sebagai lembaga keuangan yang bekerja sama dengan Dongfang Electric Corporation untuk mendanai proyek tersebut.

Menurut Binarto, langkah selanjutnya karena proyek mendesak untuk dijalankan, Dongfang Electric akhirnya menggandeng investor nasio-

nal untuk bekerja sama mendanai proyek itu. Investor nasional yang terpilih yaitu PT Petra Unggul Sejahtera.

PT Petra Unggul Sejahtera, menurut dia, selanjutnya mendapatkan komitmen pendanaan dari tiga bank nasional a.l. Bank BNI, Mandiri, dan BRI.

Tiga Bank ini selanjutnya akan menerbitkan *letter of credit (L/C)* sebagai jaminan untuk mendapatkan dana dari Bank of China.

"Namun pencairan dana dari tiga Bank nasional tersebut belum dapat dipastikan karena ada beberapa dokumen yang belum disiapkan investor [PT Petra Unggul Sejahtera]," kata Binarto.

Sementara itu, untuk pengerjaan proyek awal selanjutnya diperoleh dari ekuitas yang disetor PT Petra Unggul Sejahtera yang diperkirakan 15% dari total anggaran yang dibutuhkan.

Pimpinan BNI Batam Asep Haryanto yang dihubungi *Bisnis*, mengatakan pihaknya sama sekali tidak mengetahui hal itu. "Mungkin ini kebijakan langsung dari kantor pusat," katanya. BNI pusat sendiri belum mengkonfirmasi hal itu ke BNI Batam.

Namun untuk menerbitkan L/C, menurut dia, tidaklah mudah, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. (K33)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	<input checked="" type="checkbox"/> SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	<input checked="" type="checkbox"/> 18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 7											TAHUN 2006																			

MOU AKHIR SEPTEMBER

Indonesia Power Jual Listrik ke Singapura

BANDUNG- Anak perusahaan PT PLN, PT Indonesia Power akan membangun pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) di Batam berkapasitas 2x100 MW. Listrik tersebut sepenuhnya akan dijual ke Singapura, melalui kabel bawah laut (*submarine cable*).

"Kami akan menandatangani MoU untuk membentuk konsorsium bersama Singapura dan Jepang. Mudah mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan," kata Direktur Pengembangan dan Niaga PT Indonesia Power Bambang Isti Eddy di Bandung, pekan lalu.

Menurut dia, pihaknya belum menentukan jumlah investasi yang dibutuhkan, karena mencakup biaya untuk pembangunan kabel bawah laut. Bambang mengatakan, dalam konsorsium terdiri atas IP (10%), ORIX Corporation Jepang (30%), GUDC Singapura (30%) dan lainnya (30%). Listrik itu nantinya akan dibeli oleh perusahaan Singapura, Tuas Power. "Prinsipnya sama seperti Indonesia Power menjual listrik ke PLN," ujar dia.

Bambang mengungkapkan, konsorsium ini nantinya akan bernegosiasi dengan calon pemasok gas. Saat ini ada dua sumber gas yang akan dipilih, yakni dari Sumatera Selatan yang dioperasikan oleh perusahaan Conoco Phillips dan dari Natuna.

"Kami akan menyeleksi mana yang terbaik. Yang pasti harganya lebih murah dibanding harga gas di Singapura. Di dalam negeri harga gas sekitar US\$ 3,5 per mmbtu, jauh lebih ekonomis dibanding harga gas di Singapura yang mencapai US\$ 6 per mmbtu," kata Bambang.

Menurut dia, setelah konsorsium memperoleh kesepakatan dengan pemasok gas,

pembangunan pembangkit bisa segera dimulai. Diperkirakan, pembangunan itu memakan waktu sekitar dua tahun.

Bambang mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan IP. Menurut Bambang, proyek ini mampu memberikan banyak nilai tambah. Pertama bagi perusahaan, karena memperoleh harga jual listrik yang jauh lebih tinggi, dibanding harga jual ke dalam negeri. Kedua, pemasukan bagi negara melalui pajak ekspor dan ketiga bagi warga sekitar.

"Belum lagi tenaga kerja yang bakal terserap. Ini tentunya lebih baik ketimbang kita hanya mengekspor gasnya saja dan mereka membangun pembangkit listrik sendiri di Singapura," papar Bambang.

Kerja sama ini juga merupakan bagian dari strategi IP mengembangkan usaha yang berorientasi bisnis murni. Saat ini, IP mengoperasikan 126 unit pembangkit listrik dengan total kapasitas 8.992 MW atau 46% dari total daya terpasang listrik di Pulau Jawa dan Bali. Pengoperasian pembangkit itu terbagi dalam delapan Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) yang tersebar di Jawa dan Bali.

Target IPO

Mengenai rencana Indonesia Power melakukan penawaran perdana saham kepada publik (*Initial Public Offering/ IPO*), Bambang menjelaskan, jadwal IPO terpaksa mundur dari tahun ini menjadi

tahun depan.

Hal itu terkait dengan rencana pemerintah membangun pembangkit batu bara 10.000 MW, mengingat sebagian dari pembangkit itu kemungkinan akan dikelola oleh Indonesia Power.

"Kami belum tahu, berapa banyak pembangkit itu yang akan dikelola IP. Yang pasti, kalau pembangunan pembangkit 10.000 MW terwujud, aset Indonesia Power juga akan bertambah begitu pula jumlah listrik yang dijual. Kepastian tersebut sangat penting sebelum memutuskan melakukan penawaran saham kepada publik," katanya.

Setelah ada kepastian mengenai masalah tersebut, Indonesia Power akan segera menawarkan 10% sahamnya kepada publik. Dari kegiatan IPO itu diharapkan Indonesia Power dapat meraup dana senilai Rp4 triliun yang akan digunakan untuk pengembangan usaha.

"Dengan menjadi perusahaan publik maka Indonesia Power dapat lebih mudah mencari pendanaan dari lembaga keuangan bagi kegiatan ekspansi usaha. Itu tujuan utamanya," katanya. (es)

Kapasitas Pembangkit PT Indonesia Power

Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)
Suralaya	3.400
Priok	1.348
Semarang	1.469
Perak Grati	864
Saguling	798
Kamojang	375
Mrica	306
Bali	433
Lain-lain	76

Sumber: PT Indonesia Power

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31								
HALAMAN : 15											TAHUN 2006

Saguling Masih Optimal Dukung Beban Puncak

BANDUNG (SINDO) – Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Saguling yang memiliki kapasitas daya terpasang 798 MW masih optimal untuk dioperasikan, khususnya untuk mendukung beban puncak. Sebab, waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pada saat beban puncak hanya kurang dari 10 menit.

"Hingga sekarang produksi listrik masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan listrik pada beban puncak dari pukul 17.00 WIB sampai 22.00 WIB," ujar Kepala UBP Saguling Indonesia Power Sudibyanto di Bandung, baru-baru ini.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Indonesia Power Lili Tjarli Tahlan mengatakan, ketinggian air waduk saat ini hampir mendekati batas minimal ketinggian air normal. Karena itu, kata dia, pihaknya mengatur pola pengoperasian pemakaian air waduk agar tidak sampai di bawah batas minimum. "Makanya, di luar beban puncak, PLTA Saguling hanya mengoperasikan satu unit saja," katanya. (ahmad senoadi)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 17											TAHUN 2006																			

KELISTRIKAN

Bupati Ende Tolak Dana Pembangunan PLTB

ENDE (Suara Karya): Paulinus Domi, Bupati Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), menolak alokasi dana sekitar Rp 7 miliar dari pemerintah pusat untuk pembangunan 7 unit Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Ende.

"Saya khawatir tidak mampu mengelola dana sebesar itu. Selain itu, kami tidak punya tenaga ahli di bidang energi," kata Paulinus Domi kepada rombongan wartawan peserta Geothermal Expedition 2006 PT PLN (Persero) Wilayah NTT, di Ende, kemarin.

Geothermal Expedition (Ekspedisi Panas Bumi) merupakan program PT PLN Wilayah NTT bersama wartawan media cetak dan elektronik untuk mendatangi sumber-sumber energi nonbahan bakar minyak (BBM) di Flores bagian barat yang berlangsung selama 4 hari.

Menurut Paulinus Domi, dana itu dialokasikan dari Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Departemen Sumber Daya Energi baru-baru ini dengan tujuan mengatasi krisis energi listrik di Kabupaten Ende dan sekitarnya. Namun, Pemerintah Kabupaten Ende menghendaki pembangunan 7 unit PLTB dilakukan oleh pemerintah. "Saya juga dengar pemerintah kewalahan bagaimana caranya PLTB dibangun di Ende," tuturnya.

Dia menambahkan, teknologi pengelolaan energi tenaga bayu merupakan hal baru bagi masyarakat setempat sehingga penanganannya perlu kehati-hatian. Sebaiknya pembangunan PLTB langsung ditangani pemerintah pusat.

Domi juga menjelaskan, hingga kini jasa kelistrikan belum menjangkau semua desa. Di sini masih

ada 130 desa/kelurahan yang belum menikmati listrik.

Sebenarnya potensi energi panas bumi di Ende cukup banyak, namun belum dikelola. Pemerintah Kabupaten Ende berharap adanya investor dari luar daerah berinvestasi di energi panas bumi, antara lain energi panas bumi Mutubusa di Desa Sokoria, Kecamatan Ndona Timur, dan Lasugolo di Kecamatan Kota Baru.

Pada tahap awal pengeboran landaian suhu untuk tujuan penelitian geologi di lapangan panas bumi Sokoria, misalnya, pada pengeboran awal Sokoria 1 (SK1) pada kedalaman 160,50 meter, terdapat panas bumi mencapai 74,3 derajat Celcius (C). Sementara pada pengeboran SK 2 dengan kedalaman 127 meter, terdapat temperatur sebesar 82,3 derajat C. (Bonne Pukan)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST ~~SEPT~~ OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ~~18~~ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

PENYEDIAAN LISTRIK

TAHUN 2006

Musim Kemarau, UBP Saguling Masih Bisa Operasikan Tiga Unit

BANDUNG (Suara Karya): Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Saguling yang memiliki kapasitas daya terpasang sebesar 798 megawatt (MW) masih optimal untuk dioperasikan, khususnya untuk mendukung beban puncak (*peak load*). Sebab waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan saat beban puncak hanya kurang dari 10 menit.

Saat puncak musim kemarau masih berlangsung, kapasitas produksi listrik terbesar dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Saguling yang mencapai 700 MW masih dapat menjalankan keempat turbin yang ada.

Sedangkan sub unit lainnya di UBP Saguling, PLTA Bengkok, PLTA Dago, PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Cikalong, PLTA Parakan Kondang dan PLTA Krakak yang berdaya lebih kecil meng-

alami penurunan yang beragam.

Menurut Kepala Unit Bisnis Pembangkit (UBP) Saguling Indonesia Power, Sudibyanto, hingga sekarang produksi listrik masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan listrik pada beban puncak dari pukul 17.00 Wib sampai 22.00 Wib.

Namun, dia mengaku pesimis produksi listrik dari Waduk Saguling pada 2006 akan memenuhi target semula 2,2 miliar KWH mengingat musim kemarau yang berlangsung panjang. "Produksi listrik dari Waduk Saguling pada tahun ini, diperkirakan hanya menghasilkan 2 miliar KWH saja", kata dia di Bandung, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan pula target produksi listrik demikian dapat tercapai asalkan pada musim penghujan yang akan berlangsung mulai

Oktober 2006 nanti, curah hujan yang turun cukup besar hingga meningkatkan debit air di waduk tersebut.

Saat ini, ketinggian permukaan air di atas laut masih mencapai 631 meter kubik di atas ketinggian minimum 625 meter kubik. Sedangkan ketinggian ideal mencapai 643 meter kubik di permukaan air dari atas laut (Mdpl).

Sementara itu, Sekretaris perusahaan PT Indonesia Power Lili Tjarli Tahlan mengatakan, ketinggian air waduk hampir mendekati batas minimal ketinggian air normal. Karena itu, kata dia, pihaknya mengatur pola pengoperasian pemakain air waduk agar tidak sampai di bawah batas minimum.

Dia berharap hujan akan segera turun karena dengan adanya pasokan air hujan maka kapasitas air di waduk saguling akan

bertambah sekitar 300-400 meter kubik per detik. Sementara pada saat ini pemasokan air rata-rata tinggal empat meter kubik per detik. "Di luar beban puncak, yaitu pada siang hari PLTA Saguling hanya mengoperasikan satu unit saja," katanya.

Berdasarkan pantauan di PLTA Saguling, saat ini air masuk sekitar 4 meter kubik per detik, sedangkan jika saat musim hujan mencapai sekitar 350 meter kubik per detik. "Sehari rata-rata ketinggian permukaan air waduk turun 7 cm," kata staf pengoperasian PLTA Saguling Didin.

Lili menambahkan, penurunan kapasitas air di waduk Saguling belum berdampak besar bagi pengoperasian PLTA karena keberadaan PLTA Saguling di desain terutama untuk mendukung pasokan listrik pada saat beban puncak. (Abdul Choir)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 19											TAHUN 2006																			

PENCANANGAN GERAKAN HEMAT LISTRIK USIA DINI DI SDN NAGRAK, TANGERANG

Jangan Dipakai Hanya untuk Nonton Televisi

SEBAGAI salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang melakukan kegiatan "Gerakan Muda Peduli Energi dan Lingkungan". Pelaksanaan gerakan yang bekerja sama dengan Korps Merah Putih ini dilakukan di 80 SD di sekitar wilayah Jakarta dan Tangerang. Salah satunya, diselenggarakan di SDN Nagrak, Desa Nagrak, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis (14/8). Program bina lingkungan tahun 2006 ini lebih memfokuskan pada sosialisasi gerakan hemat energi/listrik pada anak-anak SD.

Menurut Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya

Alam Bidang Kemasyarakatan Hardi Prasetyo, program hemat listrik merupakan strategi perusahaan demi mengurangi biaya produksi yang meningkat, pascakenaikan BBM beberapa waktu lalu. Melalui program DSM (*Demand Side Management*), dicanangkan penghematan 50 watt per pelanggan dan penggunaan lampu hemat energi (LHE). "Jadi, sumber daya listrik jangan dibuang untuk hal-hal yang tidak berguna, seperti menonton televisi secara berlebihan ataupun main games. Gunakan listrik untuk kepentingan penting, seperti penerangan pada saat belajar. Kalau tidak perlu, sebaiknya dimatikan untuk menghemat pembayaran listrik tiap bulannya," terang dia di depan 300 murid SDN Nagrak, Tigaraksa.

Manajer Umum PT PLN

Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Fahmi Mochtar menuturkan, penghematan listrik memang harus dimulai pada anak-anak SD. Dengan begitu, saat dewasa kelak, perilaku hemat sudah terpatrit dalam kepribadian mereka. "Ke depannya, tidak menutup kemungkinan listrik menjadi barang yang langka. Karena itu, kami mengajak partisipasi masyarakat untuk aktif dalam gerakan peduli energi melalui penghematan listrik dan lingkungan," tuturnya. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala SDN Nagrak Rafiudin, guru, orangtua murid, dan penda setempat.

M Satibi Askara, perwakilan Korps Mahasiswa Merah Putih, menyatakan bahwa SDN Nagrak sengaja dijadikan lokasi pencaanangan karena kondisi bangunan tersebut tidak layak

pakai. Penerangan kurang, kerap becek jika hujan turun meski memiliki siswa banyak yakni 1.088 orang. "Mudah-mudahan, dengan adanya listrik di tiap-tiap kelas, kegiatan belajar dapat berjalan normal. Setahu saya, sebanyak tujuh kelas tidak dipasang

instalasi listrik, sehingga jika sore hari dan suasana gelap, kegiatan belajar-mengajar terpaksa dihentikan," katanya sambil mengatakan bahwa SDN Nagrak memiliki luas sekitar 1 ha dan terdapat 13 ruangan. (sujoni)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2006

IPO Indonesia Power Tunggu Crash Program

BANDUNG (SINDO) – PT Indonesia Power (IP) memastikan penawaran saham perdana (*initial public offering/IPO*) perusahaannya akan menunggu proyek percepatan pembangunan dan pengoperasian jaringan pembangkit listrik 10 ribu MW (*crash program*) yang dilakukan PT PLN (Persero). Dengan demikian, IPO diperkirakan baru bisa dilaksanakan tahun 2007.

"Saat ini kita masih tergantung dengan perusahaan induk (PLN). Sejak Oktober 2005, sebetulnya kita sudah siap-siap (IPO), tapi hingga 2006 ditunda. Kalau menurut Menteri Negara BUMN Sugiharto, baru bisa 2007 nanti," ujar Direktur Pengembangan dan Niaga IP Bambang Isti Eddy di Bandung, kemarin.

Bambang menjelaskan, proyek 10 ribu MW tersebut rencananya akan dibagikan PLN ke anak perusahaannya, IP dan PJB. Karena itu, kata dia, IPO ditunda lantaran pihaknya harus memastikan rencana tersebut. "IPO kan juga menjual masa depan perusahaan. Dengan proyek itu, pembangkitan kita juga akan meningkat sehingga investor akan semakin tertarik," katanya.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) IP Kartawan Muchtar menambahkan, pihaknya telah mengajukan beberapa lokasi untuk pengoperasian dalam pembangunan pembangkit 10 ribu MW tersebut. Menurut dia, dari 10 lokasi se-Jawa, sangat dimungkinkan IP mengoperasikan pembangkit yang akan dibangun di sekitar Suralaya. (ahmad senoadi)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA		<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																												
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 14											TAHUN 2006																			

IP akan Bangun PLTGU di Batam

BANDUNG — PT Indonesia Power (IP), anak perusahaan PT PLN, akhir September ini akan menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan Singapura untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 2x100 Megawatt (MW) di Batam.

"Perjanjian MoU itu akan ditandatangani bersama dengan Tuas Power, sebagai pihak pembeli energi tersebut," kata Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha Indonesia Power (IP), Bambang Isti, di Bandung, Ahad (17/9).

Selain dengan Tuas Power, menurut Bambang Isti, rencana pembangunan pembangkit listrik di Batam tersebut juga melibatkan sejumlah kontraktor migas nasional maupun asing. Hanya saja, saat ini belum diputuskan dari mana sumber gasnya, apa-

kah dari ladang gas di Sumatra Selatan yang dikelola ConocoPhillips atau dari lapangan gas Natuna yang dikelola Pertamina.

Karena itu, menurut Bambang, pihaknya tidak dapat menyebutkan nilai investasi dari proyek PLTGU Batam mengingat belum ditentukan nilai kontrak jual-beli gasnya. Namun yang pasti, pasokan gas akan diambil dari wilayah Indonesia karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga gas di Singapura.

Terkait dengan tarif dasar listrik (TDL), anggota Komisi VII DPR, Catur Sapto Edi, mengatakan sebetulnya tidak harus melonjak naik dari tahun ke tahun. "TDL bisa turun jika pemerintah mengoptimalkan penggunaan energi primer selain BBM untuk menyuplai pembangkit listrik,"

katanya.

Namun menurut dia, pemerintah selalu saja kalah saat menjamin pasokan tersebut dari pihak swasta. Padahal, pasokan tersebut menjadi hak pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah, kata Catur, selalu menjadikan kesulitan menjangkau investasi sebagai alasan untuk meniadakan jaminan pasokan energi primer tersebut.

Catur mengatakan, masyarakat saat ini sudah mampu membayar TDL sebesar tujuh sen dolar. Padahal, sebelumnya pemerintah menetapkan lima sen dolar AS.

Berarti, kata dia, terdapat margin sebesar dua sen. Dengan penggunaan energi lain di luar BBM, Catur menegaskan, akan menurunkan TDL ini. ■ ria/ant

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST ~~SEPT~~ OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2006

Berkas Korupsi PLN Dilimpahkan

Berkas berita acara pemeriksaan (BAP) kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat PT PLN Area Pelayanan (AP) Kediri, Jawa Timur, senilai Rp 97 juta, telah dilimpahkan ke kejaksaan negeri setempat. Kepala Satuan Reskrim Polresta Kediri AKP Isbari Minggu mengatakan, beberapa hari lalu BAP empat tersangka kasus korupsi tersebut telah ditandatangani Kepala Polresta Kediri AKBP Adnas. Mengenai lambatnya proses tersebut, dia mengaku karena penyidik Polresta Kediri harus menunggu hasil audit BPKP di Surabaya selama dua bulan sejak menangani kasus pada pertengahan 2005. (Ant/Gungde)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST <u>SEPT</u> OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 7		TAHUN 2006

Proyek PLTU 10.00 MW Butuh Banyak Kapal dan Pelabuhan

JAKARTA – Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai, angkutan batu bara untuk program percepatan pembangunan (*crash program*) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 10.000 MW terancam sulit dipenuhi, akibat kurangnya armada perkapalan dan juga fasilitas pelabuhan.

Anggota Perhapi Budi Santoso mengatakan, untuk pengiriman batu bara kalori rendah saat ini saja sudah sering menemui kendala. "Kapal, baik tongkang maupun kapal penarik, tidak siap. Untuk saat ini saja saya dengar masih kekurangan tongkang dan kapal penarik yang berdaya muat 40 ribu ton," katanya, pekan lalu.

Menurut dia, saat ini jumlah pelabuhan di Kalimantan sebagai sumber utama batu bara kalori rendah, masih sedikit. Paling tidak, kata Budi, dibutuhkan 8-20 pelabuhan baru untuk menunjang kebutuhan transportasi yang memiliki kapasitas 80 juta ton per tahun.

Dia mengatakan, satu pelabuhan ukuran kecil bisa untuk menangani 5 juta ton per tahun batu bara. "Jadi kalau produksi batubaranya ditingkatkan, paling tidak pelabuhan-pelabuhan yang ada sekarang juga ditambah," katanya.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Jeffrey Mulyono mengatakan, transportasi laut menjadi salah satu ancaman bagi suplai batu bara untuk pembangkit 10.000 MW. Menurut dia, pembangunan pelabuhan dan penyediaan kapal bisa dilaksanakan dalam waktu dua tahun.

"Sisa waktu yang dijadwalkan untuk pembangunan 10.000 MW tinggal 2,5 tahun. Jadi dalam 6 bulan ini harus sudah ada kepastian soal tender batu bara, jangan lebih dari itu," jelasnya.

Jeffrey mengatakan, satu hal penting lain yang harus diperhatikan pemerintah adalah penerapan asas *cabotage* pada 2010, yakni tidak bolehnya kapal asing mengangkut batu bara. Padahal, data Departemen Perhubungan menyebutkan kapal nasional hanya mengangkut 10% dari 34,5 juta ton muatan batu bara nasional per tahun. (ari)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST ~~SEPT~~ OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ~~18~~ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2006

Pemadaman Listrik di Sumsel Meluas

PALEMBANG (Media): Wilayah yang terkena pemadaman listrik di Sumatra Selatan (Sumsel) meluas. Setelah Kota Palembang gelap gulita, kini sejumlah daerah lainnya mengalami nasib serupa.

Parahnya lagi, pemadaman akibat krisis listrik itu berlangsung tidak menentu.

Informasi yang dihimpun *Media Indonesia*, pemadaman listrik juga terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Banyuasin. Di Ogan Ilir pemadaman antara lain terjadi di daerah Inderalaya, Tanjungraja, dan Tanjung Batu. Di Ogan Komering Ilir yang terkena pemadaman adalah Kayuagung, Pedamaran, dan Tanjung Lubuk, sedangkan di Kabupaten Banyuasin yang gelap gulita antara lain Pangkalan Balai dan Betung.

"Di Kayuagung dan sekitarnya pemadaman sudah berlangsung dua pekan terakhir ini. Listrik menyala tidak menentu. Kadang-kadang di siang hari padam, tapi kebanyakan di malam hari, baru menjelang subuh hidup lagi," ujar Bupati Ogan Komering Ilir Ishak Meki saat dihubungi dari Palembang, akhir pekan lalu.

Dia mengaku sudah beberapa kali menghubungi PT PLN agar listrik menyala normal, tapi PLN menyatakan kekurangan pasokan listrik.

Selain di Kayuagung dan Pedamaran, tambah Ishak, pemadaman bergilir terjadi juga di Tanjung Lubuk hingga ke desa-desa di sepanjang jalan lintas timur (jalintim) Sumatra hingga ke Mesuji di perbatasan Provinsi Lampung.

Di Ogan Ilir listrik juga tidak menyala normal sejak seminggu terakhir. Masyarakat Inderalaya, Tanjung Batu, dan Tanjung Raja mengeluhkan kondisi tersebut. "Masyarakat hanya bisa mengeluh sebab memang nyala listrik ini tidak bisa dipaksakan," ujar anggota DPRD Ogan Ilir Syamsurizal.

Seharusnya, kata dia, PLN memprioritaskan listrik menyala pada saat-saat para siswa harus belajar di rumah, yaitu malam hari. Kenyataannya justru pada malam hari wilayah tersebut gelap gulita.

Sedangkan di Pangkalan Balai dan Betung, Wakil Ketua DPRD Banyuasin Arkoni meminta PLN menyosialisasikan pemadaman bergilir kepada masyarakat.

Krisis listrik

Sementara itu, krisis listrik di Riau dipastikan teratasi pada 29 September mendatang setelah PLN mendapat daya listrik tambahan sebesar 20 megawatt (Mw) dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Teluk Lembu.

"Pemadaman bergilir akan dihentikan pada Oktober mendatang setelah kita menerima kepastian dari pihak Riau Power yang melakukan penambahan daya sebesar 20 megawatt pada akhir Septem-

ber," kata Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Wilayah Riau Sunggu Anwar Aritonang.

Kebutuhan listrik Riau sebesar 226 Mw, ujarnya, selama ini belum bisa terpenuhi melalui sistem jaringan interkoneksi wilayah Sumatra yang dibantu oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang yang hanya memiliki daya 114 Mw. Sedangkan tambahan daya dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin serta Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Teluk Lembu hanya mampu memberikan total daya sebesar 206 Mw. Akibatnya, terjadi defisit daya sebesar 20 Mw.

Dari Balikpapan dilaporkan, beberapa mesin diesel yang dipergunakan PLN di Kalimantan Timur (Kaltim) rentan terhadap kerusakan.

Menurut Deputi Manajer Komunikasi PLN Kaltim Chairil Anwar,

mesin-mesin tersebut sudah tua sehingga sangat memengaruhi pasokan listrik. Karena itu pula, aliran listrik di provinsi ini kerap padam.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebanyak 117 dari 254 desa yang ada belum terjangkau jaringan listrik dari PLN akibat keterbatasan dana. Menurut Wakil Bupati Manggarai Deno Kamelus, bahkan ada satu kecamatan yang seluruh desanya belum terjangkau listrik, yaitu Kecamatan Elar.

Padahal, katanya, daerah itu memiliki potensi ekonomi cukup besar dengan adanya perkebunan kopi dan vanili. Wilayah Elar memiliki derajat kemiringan sekitar 70%. Kondisi tersebut membuat PLN harus menanamkan investasi tinggi dalam mengembangkan jaringan listrik ke wilayah tersebut.

(AY/RK/BY/SU/PO/N-1)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 36												TAHUN 2006																		

Bisakah Krisis Listrik di Sulsel Teratasi?

Hari-hari belakangan ini banyak warga Makassar, Sulawesi Selatan, "marah" kepada PLN. Sebab, mereka menjadi korban pemadaman listrik secara bergilir terus-menerus. Menjelang Ramadhan—saat banyak aktivitas di malam hari—ini, baik warga maupun pemerintah daerah mengingatkan agar pemadaman, sekalipun harus dilangsungkan, jangan dilakukan pada malam hari.

Oleh RENY SRI AYU TASLIM
— dan SUBHAN SD



ANTARA/YUSRAN UCCANG

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Kota melakukan aksi di Makassar, Senin (11/9). Mereka menolak pemadaman bergilir yang dilakukan PLN setempat.

Menurut warga, pemadaman listrik telah mengganggu aktivitas sehari-hari. Mereka berpendapat, pemadaman bukanlah solusi, mengingat krisis listrik merupakan persoalan kronis yang tak kunjung mendapatkan jalan keluar. Begitu kesalnya warga sehingga Kantor PLN Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara di Jalan Hertasning Makassar pun belakangan ini sering didatangi pengunjung rasa. Sebagai bentuk protes, para pengunjung rasa bahkan melempari kantor itu dengan tomat busuk.

Pemerintah maupun PLN dinilai lamban mengatasi krisis listrik yang mendera Sulsel. Dalam beberapa tahun ini pemadaman bergilir di Makassar dan kabupaten lainnya di Sulsel seakan menjelma menjadi "hantu", yang datang pada siang maupun malam hari. Setiap saat warga terbayang soal pemadaman bergilir. "Hari ini jam berapa pemadaman? Berapa kali dan berapa lama?" demikian pertanyaan yang acap muncul dari warga.

Pemadaman listrik membuat warga tak bisa lagi mencuci atau menyetrika pakaian sesuai "jadwal normal". Semua pekerjaan yang tergantung listrik terpaksa dikumpulkan pada saat listrik menyala. Warga juga mengeluh, banyak alat-alat listrik mereka yang rusak akibat pemadaman listrik yang berkali-kali. Sehari-acap tiga kali pemadaman.

"Ini sudah mengganggu dan merugikan warga. Kalau kekesalan menghadapi pemadaman ini terakumulasi dengan berba-

gai persoalan lain, dikhawatirkan bisa timbul hal-hal yang negatif," kata Aswar Hasan, pengajar ilmu komunikasi Universitas Hasanuddin, yang terganggu atas pemadaman tersebut.

Faktor alam

Walaupun dihujat masyarakat, PLN Unit Bisnis Wilayah Sulselra terkesan hanya bisa menerima nasib. Faktor alam menjadi alasan klasik tentang tak normalnya sistem kelistrikan di Sulsel. PLTA Bakaru yang menyuplai 25 persen-32 persen energi listrik di Sulsel, nyaris kekeringan air pada musim kemarau ini. Setiap saat, debit airnya menyusut. Masalah makin parah karena sedimentasi di PLTA itu memprihatinkan. Diperkirakan tumpukan sedimen di Bakaru sudah lebih dari satu juta meter kubik sehingga memengaruhi arus air yang masuk ke turbin.

Awal September ini debit air PLTA hanya 12 meter kubik per detik. Padahal pada saat normal mampu memasok 126 megawatt (MW)—dengan debit air 45 meter kubik per detik. Kondisi saat ini mengakibatkan dua mesin pembangkit tak bisa difungsikan optimal. Pada saat beban puncak, kedua turbin bisa hidup, tetapi hanya beberapa jam.

Ikhsan Asaad, Manajer Area Penyaluran dan Pengatur Beban Sistem Sulselrabar (Sulsel, Sultra, dan Sulbar), PLN Wilayah Sulselra mengatakan, saat satu turbin yang berfungsi, daya yang dihasilkan tinggal 50 MW-70 MW—dari 126 MW saat normal.

Sampai kini sistem kelistrikan di Sulsel selain dipasok PLTA Bakaru (kapasitas 126 MW), juga dipasok Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Suppa (65 MW), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tello (197 MW), PT Energi Sengkang (135 MW), PLTA Bili-bili (20 MW), dan sejumlah pembangkit lainnya yang berkapasitas kecil. Tetapi, sejak beberapa bulan ini pembangkit-pembangkit itu kerap menghadapi sejumlah kendala. Sejak beberapa waktu lalu PLTA Bili-bili juga tak beroperasi maksimal karena sumber air yang ada harus dibagi untuk kepentingan irigasi dan air bersih. Karena itu, PLTA itu rata-rata hanya menyuplai 9 MW (siang) dan 13 MW (malam).

Runyamnya, masalah kelistrikan di Sulselra seakan silih berganti dan terjadi rutin setiap tahun. Tatkala beberapa PLTA didera faktor alam, sejumlah pembangkit lainnya menghadapi masalah lain lagi. Sejak enam bulan terakhir ini PLTD Suppa, PLTG Sengkang (PT Energi Sengkang), dan PLTU Tello tak mampu beroperasi secara optimal karena sejumlah mesinnya mengalami perbaikan berkala. PLTG Sengkang yang mempunyai tiga mesin pembangkit hanya mampu menyuplai 67,5 MW dari daya normal 135 MW. Di PLTU Tello, dari 11 pembangkit yang beroperasi hanya 3 mesin. Sisanya, selain dalam perbaikan juga ada yang rusak. Karena itu, belakangan ini PLTU Tello hanya mampu memasok 70 MW.

MUSIBAH

Pemadaman Listrik Bergilir Bikin Susah Orang-orang Kecil

"Ya... mati lagi. Parah kalau begini. Pesanan tidak bisa cepat selesai," gerutu Rahmat, pemilik bengkel las listrik di bilangan Jalan Mallengkeri, Makassar, Sulawesi Selatan. Kamis (14/9) siang itu, ketika listrik tiba-tiba padam, Rahmat dan beberapa pekerjanya sedang giat-giatnya menyelesaikan pesanan pagar dan terali besi dari sejumlah pemesan. Praktis pekerjaan mengelas langsung dihentikan. "Kalau listrik begini terus, saya susah. Padahal sekarang lagi banyak-banyaknya pesanan. Gara-gara lampu sering mati, banyak pesanan yang tidak bisa selesai tepat waktu dan akhirnya pekerjaan jadi tertunda-tunda," kata Rahmat.

Keluhan serupa diungkapkan pekerja di bengkel las Dedi, di bilangan Perumnas Panakkukang. Kamis pukul 12.00, saat listrik padam, itu para pekerja sedang mengejar waktu untuk menyelesaikan pesanan terali untuk jendela. Para pekerja akhirnya berhenti mengelas hingga pukul 14.00, saat listrik menyala lagi.

Bengkel

Para pemilik bengkel mengaku, akibat pemadaman listrik, mereka rugi. Sebab bukan hanya pesanan yang penyelesaiannya tertunda, dan pekerjaan jadi menumpuk dan biaya membengkak. Di bengkel las Rahmat, misalnya, lima pekerja tidak tetap di bengkel tersebut diberi upah Rp 20.000 per hari.

Pekerja ini hanya datang saat pesanan banyak, dengan waktu kerja pukul 08.00-pukul 16.00. Dengan listrik yang sering padam saat jam kerja, praktis pekerjaan menjadi lama dan upah harian yang dikeluarkan bertambah. "Kalau satu pesanan biasanya bisa selesai satu minggu, sekarang terpaksa selesai lebih dari satu minggu. Jadi bisa dihitung berapa tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk upah karyawan. Usaha saya ha-

nya usaha kecil-kecilan. Semakin banyak biaya yang dikeluarkan, semakin sedikit pendapatan. Bahkan, bisa-bisa saya rugi kalau begini terus. Belum lagi diprotes karena pesanan yang tidak tepat waktu," papar Rahmat.

Syaiful, pemilik usaha mebel di Perumnas Panakkukang, yang banyak menggunakan gergaji listrik dan peralatan listrik lainnya, juga mengeluhkan hal serupa. "Kesalnya, sedang menggergaji kayu, listrik tiba-tiba padam. Terpaksa berhenti bekerja. Sudah begitu, PLN tidak mengumumkannya jadwal pemadaman. Kalau ada jadwal, mungkin pekerjaan dan jam kerja bisa diatur. Misalnya, jam masuk dimajukan atau dimundurkan. Karena kalau pekerjaan jadi lama, upah yang harus dikeluarkan juga bertambah," kata Syaiful.

Sejumlah pemilik usaha penyewaan komputer dan warnet juga menyatakan kekecewaan mereka atas pemadaman listrik bergilir. "Sebenarnya kesal juga kalau lampu tiba-tiba padam dan pelanggan langsung pergi semua. Belum lagi ada yang *ngomel-ngomel* kalau datanya tidak sempat tersimpan atau sedang mengirim (surat elektronik) tiba-tiba (proses pengiriman) terputus. Sebenarnya kalau ada jadwal, kami kan bisa memberi tahu mereka sebelumnya," ujar seorang karyawan di warnet Wiaro, di Jalan Landak.

Lain lagi keluhan Ny Rina, warga Perumnas Panakkukang. "Beberapa minggu terakhir, saya sudah tidak bisa menyimpan nasi di pemanas atau bahan makanan dalam jumlah banyak di kulkas. Soalnya listrik sering padam. Ini jelas bikin saya jadi repot karena harus belanja bahan makanan dan memasak nasi setiap hari. Padahal kesibukan saya di luar rumah cukup banyak," gerutu ibu satu anak ini. Itulah keluhan sebagian kecil warga yang merasa pemenuhan hak mereka kurang diperhatikan. (REN)



Kuota BBM

Sebetulnya PLN Sulselra bisa saja memaksimalkan pembangkit yang menggunakan mesin-mesin berbahan baku solar di PLTU Tello atau PLTD Suppa. Namun, kondisi mesin PLTU sendiri tidak memungkinkan. Apalagi ada pembatasan kuota pembelian bahan bakar minyak.

"Untuk PLN Sulselra, kuota kami sebesar 223.000 kiloliter per tahun. Memang dengan penggunaan solar, untuk setiap kilowatt per hour (kWh) dibutuhkan 0,56 liter, yang kalau dirupiahkan menjadi Rp 2.000 per kWh. Ini cukup mahal. Kalau penggunaan solar melebihi kuota, kami kena denda," ujar Ari-fuddin Nuridin, General Manager PLN Wilayah Sulselra.

Menurut Ikhsan, dengan memaksimalkan penggunaan pembangkit yang menggunakan solar, pemakaian solar bertambah 20 persen-30 persen dari jumlah kuota. Kalau saat normal kebutuhan solar hanya sekitar 100 kiloliter-200 kiloliter per hari, dengan memaksimalkan pembangkit kebutuhan solar meningkat menjadi 600 kiloliter per hari. Untuk penambahan pemakaian solar ini saja, PLN harus mengeluarkan anggaran Rp 4 miliar-Rp 5 miliar per hari.

Pembangkit baru

Saat ini dari kapasitas terpasang sebesar 575 MW, PLN Sulselra hanya punya daya 445 MW. Saat beban puncak daya rata-rata 430 MW-440 MW. Karena itu, menghadapi kondisi

alam dan mesin-mesin pembangkit yang telah uzur, harapan PLN tak lain adalah pembangunan pembangkit baru yang andal.

Namun, proyek-proyek pembangkit baru itu diprediksi selesai pada tahun 2008-2009.

Penjelasan PLN Sulselra di hadapan DPRD Sulsel pada 10 Mei lalu bahkan membuat hati waswas tinggal di Sulsel. Sebab, pemadaman bergilir diperkirakan akan terus berlangsung di Makassar dan wilayah lainnya di Sulsel hingga tahun 2007.

Memang saat ini ada tambahan daya dari PLTU Jeneponto (2 x 100 MW), PLTU Kassa (2 x 20 MW), PLTU Bosowa (2 x 100 MW), PLTG Sengkang, PLTA Poso (120 MW), dan lainnya, di samping pemerintah pusat berjanji akan menyiapkan tambahan daya 10.000 MW. Tetapi, apakah dengan pembangkit baru krisis listrik di Sulsel akan teratasi? Pasalnya, daya pembangkit baru sudah ditunggu puluhan ribu pelanggan baru. Runyamnya, bila pengelolaan sistem pembangkit tidak dilakukan ketat seperti kasus tumpukan sedimentasi di Bakaru yang lambat ditangani, bukan tak mungkin krisis listrik di Sulsel ibarat ulangan tahunan.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 17											TAHUN 2006																			

KELISTRIKAN

Warga Riau Minta PLN Tidak Padamkan Listrik Selama Ramadhan

PEKANBARU (Suara Karya): Pemadaman listrik secara bergiliran yang dilakukan PT PLN (Persero) Cabang Pekanbaru dalam sebulan terakhir ini telah meresahkan warga Riau, khususnya yang menghuni kawasan Kota Pekanbaru.

Warga di daerah ini mengaku was-was jika kondisi pemadaman bergilir itu terus berlanjut sampai bulan Ramadhan nanti. Kepada sejumlah wartawan di daerah ini, beberapa tokoh masyarakat, terutama para ustad, meminta agar selama bulan Ramadhan pihak PLN memberikan toleransi terhadap masyarakat Islam yang sedang menjalankan ibadah di bulan puasa.

"Seperti diketahui, warga Riau, khususnya yang ada di Kota Pekanbaru, punya kebiasaan mengaji di tengah malam. Nah, kalau keinginan mengaji itu terganggu hanya karena listrik padam, maka PLN bisa dinilai tidak memerhatikan seruan umat Islam agar selama Ramadhan listrik tidak dipadamkan. Terus

terang kami sangat berharap PLN bisa memberikan toleransinya agar di bulan puasa listrik tetap menyala," ujar Uztad H Arifin Batubara dari daerah Kerinci, Riau.

Buhanuddin Salim (38), warga Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, juga menyampaikan harapan serupa melalui *Suara Karya*, kemarin. Dia mengharapkan pihak PLN memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk menjalankan ibadahnya selama bulan Ramadhan dengan tidak melakukan pemadaman listrik.

Setidaknya, menurut dia, pada malam hari tidak dilakukan pemadaman, karena pada saat itu masyarakat banyak menjalankan ibadah di mesjid atau di mushala.

Menanggapi hal itu, Manajer PLN (Persero) Cabang Pekanbaru Awaluddin Hafid mengatakan, pihaknya memang sudah mempertimbangkan untuk tidak melakukan pemadaman selama bulan Ramadhan. Tapi jika kondisi lagi kritis, terpaksa dilakukan pemadaman.

Awaluddin menyebutkan, beban puncak PLN Cabang Pekanbaru berkisar antara pukul 17.00 WIB sampai

22.00 WIB. Biasanya, PLN akan melakukan pemadaman bergilir saat pemakaian beban puncak tersebut, karena daya yang tersedia di PLN saat ini tidak sanggup melayani seluruh pelanggan.

Kendati demikian, selama bulan Ramadhan nanti, PLN akan mengupayakan untuk melakukan pengaturan pemadaman seefisien mungkin, sehingga tidak mengganggu saat-saat sibuk pelanggan menjalani ibadah puasa. Seperti saat sahur, berbuka puasa, dan tarawih.

Mengenai volume pemadaman yang akan dilakukan oleh PLN selama bulan Ramadhan nanti, Awaluddin belum bisa memperkirakan. Sebab, itu tergantung pada operasional PT Riau Power. Pengoperasian PT Riau Power nantinya, akan mampu memasok daya ke PLN sebesar 1 x 20 MW.

Dengan begitu akan mampu menutupi defisit daya yang terjadi di PLN Wilayah Riau yang mencapai 21 MW. "Kalau PT Riau Power sudah beroperasi nanti kita akan sangat terbantu. Karena bisa menutupi defisit daya yang terjadi saat ini," kata Awaluddin. (Adrizas)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2006

CRASH PROGRAM PLN

Pembangkit Terancam Kesulitan Dapatkan Batu Bara

JAKARTA (Suara Karya): Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) memperkirakan pasokan batubara untuk pembangkit listrik 10 Ribu megawatt (MW) proyek percepatan (crash program) terancam sulit dipenuhi. Pasalnya, kebutuhan batu bara berkalori rendah (low range coal/LRC) untuk dalam negeri saja sudah cukup sulit didapat.

"Kapal baik tongkang maupun kapal penarik tidak siap. Untuk kebutuhan sekarang saja saya dengar masih kekurangan tongkang dan kapal penarik yang berdaya muat 40 ribu ton," kata mantan Sekjen yang juga anggota Perhapi Budi Santoso di Jakarta, akhir pekan lalu.

Budi menilai selain kendala penyediaan kapal, pelabuhan juga masih jadi kendala lainnya. Misalnya, saat ini di jumlah pelabuhan di wilayah Kalimantan masih sedikit.

Menurut Budi, setidaknya dibutuhkan 8 hingga 20 pelabuhan baru untuk menunjang kebutuhan transportasi angkutan batubara pembangkit listrik berkapasitas 10 ribu MW yang mencapai 80 juta ton per tahun. Satu pelabuhan ukuran kecil

■ Harus Disiapkan 20 Pelabuhan Baru

bisa untuk menangani 5 juta ton per tahun batubara.

"Jadi kalau produksinya ditingkatkan, paling tidak pelabuhan-pelabuhan yang ada sekarang ditambah," ujar dia.

Di lain pihak, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Jeffrey Mulyono mengatakan, armada kapal untuk angkutan batubara pembangkit 10 ribu MW dapat di kelola dengan baik. Namun, dia mengakui bahwa transportasi laut menjadi salah satu ancaman bagi supply batubara untuk pembangkit yang tersebar di sejumlah wilayah pulau Jawa dan luar Jawa.

Pembangunan pelabuhan dan penyediaan kapal, lanjut Jeffrey, bisa dilaksanakan dalam waktu dua tahun, sementara sisa waktu yang dijadwalkan untuk pembangunan 10 ribu MW tinggal 2,5 tahun. "Dalam enam bulan ini sudah harus ada kepastian soal tender batubara, jangan lebih dari itu," ujar dia.

Selain itu, Jeffrey mengingatkan masalah krusial lainnya adalah pembangunan pelabuhan penerima batu bara. Pelabuhan ini memiliki spesifikasi khusus dan dan pembangunannya memerlukan waktu minimal dua tahun. Pembangunan pelabuhan penerima di dekat pembangkit, khususnya di Jawa harus tepat waktu atau paling tidak mulai dibangun 6 bulan mendatang. "Pembangunan

pelabuhan on loading pelabuhan penerima adalah yang paling penting, harus bisa dilaksanakan 6 bulan ini," kata dia.

Demikian pula, Jeffrey mengatakan, aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah penerapan azas cabotage tahun 2010, yakni kapal-kapal asing tidak diperkenankan lagi mengangkut batubara.

Sementara berdasarkan data Departemen Perhubungan (Dephub) kapal nasional hanya mengangkut 10 persen dari 34,5 juta ton muatan batubara nasional per tahun. Jadi, pemerintah harus mempersiapkan pengadaan kapal ini. "Sebenarnya masalah pengangkutan batubara ini manageable, tapi harus ditangani lebih serius. Kita bisa segera membuat kapal tapi harus ada kepastian soal tender itu," ujar Jeffrey.

Sementara itu, menanggapi kendala angkutan batubara untuk pasokan program percepatan pembangkit 10 ribu MW tersebut, Juru Bicara PT PLN (Persero) Mulyo Adji mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dephub dan departemen terkait soal kebutuhan transportasi laut tersebut.

Proyek percepatan pembangkit itu penting dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat sehingga memerlukan kerjasama dengan semua instansi terkait. (Abdul Cholir)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2006

INDONESIA POWER

Perubahan Status Tunggu
Program Pembangkit PLN

BANDUNG (Suara Karya): PT Indonesia Power memastikannya untuk melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) masih akan menunggu pembagian proyek pembangunan dan pengoperasian jaringan pembangkit listrik berbahan bakar batubara (*crash program* PLN) 10 ribu megawatt (MW). Dengan demikian kemungkinan besar IPO baru bisa dilaksanakan tahun 2007.

"Saat ini, kita masih tergantung dengan perusahaan induk (PLN). Sejak tahun Oktober 2005 kita sudah siap-siap, tapi hingga 2006 ditunda. Kalau menurut Meneg BUMN Sugiharto bisa 2007 nanti," kata Direktur Pengembangan dan Niaga PT Indonesia Power Bambang Isti Eddy di Unit Bisnis Pembangkit (UBP) Saguling, Bandung, kemarin.

Bambang menjelaskan, pihaknya juga masih akan menunggu dimulainya proses *crash program* PLN tahun depan. Terkait rencana IPO tersebut, pihak Indonesia Power telah melakukan *road show* ke Singapura, Hong Kong maupun Amerika Serikat (Boston dan New York) guna memastikan pembeli saham perdananya.

"Pastinya kita sudah siap, namun rencana bergeser lagi. Saat itu, kita sudah proyeksikan sebelum ada program 10 ribu MW ini," ujar dia.

Namun, Bambang menilai dengan adanya *crash program* 10 ribu MW, rencana pelaksanaan IPO akan lebih prospektif, karena Indonesia Power jika diberikan pembagian dalam proyek itu akan semakin menambah daya tarik dan tingginya harga jual yang dimiliki.

Sebab, jika anak perusahaan PLN yakni Indonesia Power dan PJB diberikan pembagian yang jelas dari PLN maka daya listrik yang dimiliki akan semakin bertambah. "Rencananya, inikan akan dibagi ke IP dan PJB. Dalam IPO sangat perlu, karena menjual masa depan. Jadi tiap tahunnya Kwh akan meningkat jadi sekian Kwh sehingga para investor semakin yakin dan tertarik," katanya.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Indonesia Power Kartawan Muchtar menambahkan, pihaknya telah mengajukan beberapa lokasi untuk pengoperasian, dalam pembangunan pembangkit 10 ribu MW.

Menurut dia, dari 10 lokasi se-Jawa, sangat di-

mungkinkan Indonesia Power dapat mengoperasikan pembangkit yang akan dibangun di sekitar Suralaya.

"Lokasi di Suralaya tanahnya sudah milik Indonesia Power. Jadi kemungkinan Indonesia Power yang mengoperasikan," ujar dia.

Sedangkan untuk lokasi yang lain, Kartawan mengatakan tergantung PLN sebagai perusahaan induk. "Untuk memudahkan kontrol, daerah Jawa Barat Utara yang kami ajukan. Syukur dapat separuh dari 10 ribu MW tadi," katanya.

IPO itu dinilainya bagian menjual prospek, maka dengan ada tambahan pengoperasian bagian dari pembangkit yang 10 ribu MW prospek bisnis Indonesia Power akan berubah.

Ia juga menegaskan tujuan IPO sebetulnya bukan untuk mengambil dana dari pasar modal sebanyak-banyaknya. "Tujuan IPO itu sebetulnya untuk mengubah status menjadi Terbuka (Tbk). Kalau statusnya menjadi terbuka, pinjaman ke bank atau ke mana-mana lebih mudah. Dan mungkin diberi bunga lebih menarik karena risikonya berkurang dibandingkan kalau 100 persen di bawah PLN," ujarnya.

Kemungkinan pelaksanaan IPO Indonesia Power, lanjut dia, jumlah uangnya tidak terlalu banyak sekitar Rp 3-4 triliun. Nilai itu setara dengan 10 persen saham PT Indonesia Power.

"Kalau Rp 4 triliun itu hanya cukup untuk pembangkit baru 400 MW. Untuk menambah pasokan listrik di Indonesia ini harus ada pembangkit baru, bukan hanya di Jawa," kata dia.

Selain itu, Kartawan juga menyebutkan Indonesia Power sudah memenangkan tender untuk pembangkit di luar Jawa, seperti di Nunukan (Kalimantan Timur), Kupang, Palu (Sulawesi Tengah), dan Sulawesi Selatan.

Ia mengaku aset Indonesia Power sekarang mencapai Rp 58 triliun dengan delapan unit bisnis dan sekitar 126 pembangkit di Jawa dan luar Jawa.

Sebelumnya, menurut dia, rencana IPO Indonesia Power sudah dirancang sejak tahun 1995 ketika Pembangkit Jawa-Bali (PJB) I menjadi Indonesia Power. Rencana IPO tahun 1997 gagal karena krisis moneter mulai lagi tahun 2000 untuk tahun 2005, yang sekarang mundur ke 2007 mendatang. (Abdul Choir)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 37

TAHUN 2006

PENGORBANAN PENDUDUK

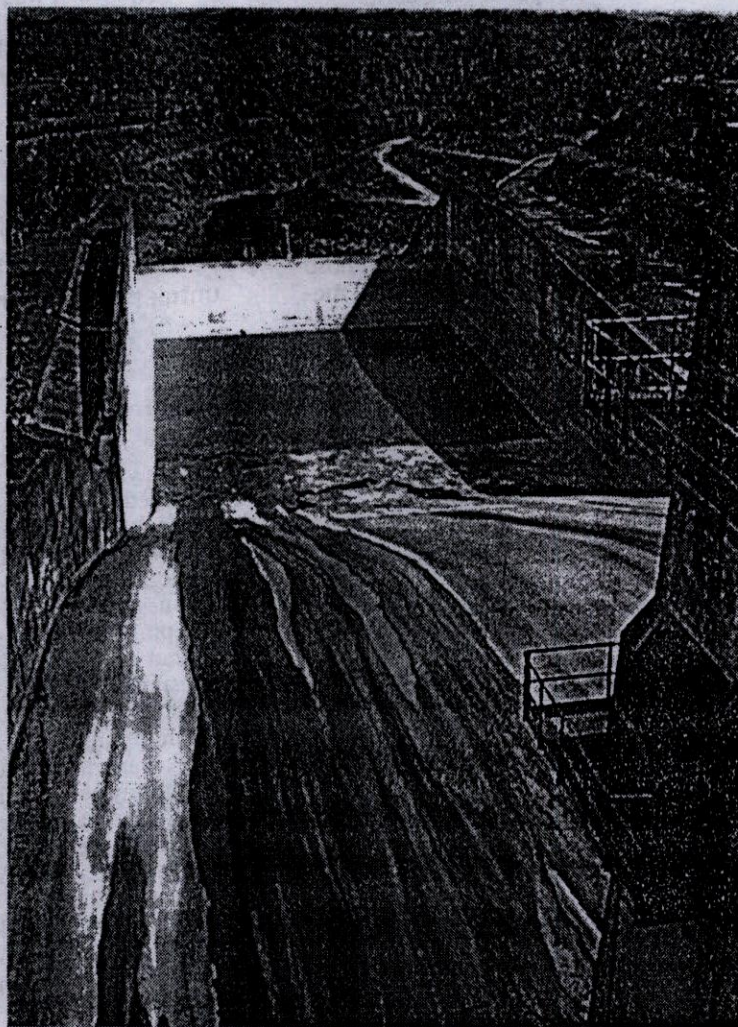
Menunggu Waduk Mrica Jadi Danau Lumpur

Genangan lumpur—seperti yang sekarang ini ada di Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur—bukan mustahil menjadi wajah Waduk Mrica di Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, 12 tahun mendatang. Jika erosi dan sedimentasi dari daerah hulu tidak dikendalikan, waduk yang diandalkan sebagai pemasok air oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Panglima Besar (Pangsar) Soedirman itu akan tertutup lumpur, dan dengan sendirinya jaringan listrik Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) akan kehilangan energi listrik sekitar 180,93 megawatt.

Maka, sia-sialah pengorbanan ribuan penduduk yang sudah terpaksa dan dipaksa merelakan sawah, tanah pekarangan, rumah, dan permukiman mereka ditenggelamkan demi pembangunan waduk untuk PLTA Pangsar Soedirman itu. PLTA itu, menurut ahli kelistrikan asing, dapat menghemat pemakaian bahan bakar minyak (BBM) 290.000 ton karena menggantikan energi listrik sebesar 3 kali 61,5 megawatt (MW) yang dihasilkan PLTA Pangsar Soedirman.

Pembangunan Waduk PLTA Pangsar Soedirman mengubah wajah sebagian wilayah Banjarnegara. Sebagian besar lahan (tanah) yang digunakan untuk lokasi pembangunan Waduk Mrica adalah desa yang nyaman dengan lahan persawahan yang sangat subur. Tidak heran apabila banyak petani menangis saat melepaskan area tersebut.

Sebanyak 32 desa di tujuh kecamatan dibebaskan untuk pembangunan waduk itu. Desa-desa tersebut ditenggelamkan secara total menjadi dasar waduk, dan kini ke 32 desa itu sudah tidak ada lagi di peta kabupaten.



KOMPAS/HINDHARYOEN NTS

Bangunan pelimpas Waduk Mrica PLTA Pangsar Soedirman, Banjarnegara, Jateng. Jika air melebihi kapasitas waduk, air akan dibuang melalui bangunan pelimpas.

Tidak dapat dibayangkan bagaimana kalau waduk yang pada awalnya diproyeksikan dapat menampung 148 juta meter kubik air dari Kali Serayu, Merawu, dan beberapa anak sungai dan digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik berubah menjadi danau lumpur raksasa.

General Manager PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangunan Mrica, Teguh Adi Nuryanto, tidak berdaya mengendalikan erosi dan sedimentasi yang saat ini diperkirakan mencapai 92 juta meter kubik. "Upaya pengendalian lumpur dengan rehabilitasi lahan di daerah hulu dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu serta lahan kritis harus merupakan gerakan nasional," ujarnya, Jumat (15/9).

Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang berkepentingan dengan DAS Serayu harus bersama-sama melakukan upaya mengendalikan erosi. Sebab, erosi dan sedimentasi yang tidak terkendali bukan hanya mengakibatkan pendangkalan waduk, tetapi juga akan menyebabkan banjir di daerah hilir.

Sebenarnya sudah ada upaya Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara untuk mengendalikan erosi dan sedimentasi yang sebagian besar berasal dari Pegunungan Dieng. Namun, upaya rehabilitasi yang dilakukan saat ini akan sia-sia karena eksploitasi terhadap dataran tinggi Dieng—untuk lahan pertanian, terutama tanaman kentang—tidak pernah berhenti. Selain itu, rehabilitasi lahan baru diluncurkan belakangan ini, setelah kondisi lingkungan dan hutan di daerah hulu rusak parah.

Pembalakan dan penjarahan hutan lindung dan hutan penyangga oleh penduduk sampai sekarang masih berlangsung, meski dalam skala kecil. Pemerintah Kabupaten (Pekab) Banjarnegara dan Perhutani Banyumas Timur memang bahu-membahu merehabilitasi 76 hektar hutan lindung.

Pekab Wonosobo, baru-bari

ini, juga mencanangkan gerakan penanaman satu juta pohon keras. Indonesia Power UBP Mrica yang berkepentingan dengan upaya pengendalian erosi dari daerah hulu Sungai Serayu dan Merawu memberikan bantuan 350.000 bibit untuk ditanam di daerah hulu sepanjang DAS Serayu. Namun, upaya rehabilitasi dan penghijauan kembali daerah hulu Sungai Serayu kalah cepat, dengan perusakan hutan.

Banyak keunggulan

PLTA, menurut Teguh, adalah pembangkit listrik yang memiliki banyak keunggulan. Selain tidak menimbulkan polusi, sumber air yang digunakan menjadi penggerak turbin PLTA sangat melimpah. Selain itu, biaya pembangunannya relatif tidak terlalu mahal. Namun, PLTA yang menggunakan waduk sebagai sumber air penggerak turbin punya musuh utama, yakni debit air sedimentasi akibat erosi dari



Sebanyak 32 desa di tujuh kecamatan dibebaskan untuk pembangunan waduk.

daerah hulu yang gundul.

Tingkat sedimentasi yang terjadi di waduk Mrica seolah ingin menunjukkan, hasil penelitian ahli dan konsultan asing—dari beberapa negara yang waktu itu memberi pinjaman uang—yang menyatakan bahwa waduk PLTA yang diresmikan Presiden Soeharto pada 23 Maret 1989 itu bisa berumur panjang, ternyata jauh dari kebenaran. Waduk yang sebelumnya oleh ahli asing diproyeksikan dapat bekerja efektif 50 tahun, kemungkinan harus berhenti ketika PLTA ini menginjak usia 32 tahun.

Nasib serupa juga diperkirakan akan dialami beberapa PLTA yang dikelola PT Indonesia Power UBP Mrica.

Selain Mrica, PT Indonesia Power UBP Mrica mengelola 11 sub-unit PLTA, yakni PLTA Kentenger di Baturraden, Purwokerto; Sempor, Wadaslintang, dan Pejengkolan di Kebumen; Garung-Wonosobo, Jelok, dan Ti-

mo di Salatiga; PLTA Wonogiri di Wonogiri; Kedungombo dan Klambu di Grobogan; serta PLTA Sidorejo di Boyolali.

Debit air yang rendah juga menjadi musuh utama semua PLTA. Pembangkit listrik Pangsar Soedirman yang memiliki tiga turbin generator membutuhkan debit air sediktnya 74 meter kubik per detik untuk menggerakkan satu turbin pembangkit. Apabila ketiga turbin digerakkan untuk mencapai kapasitas penuh, diperlukan debit air 222 meter kubik per detik.

Namun, saat ini, meski elevasi air waduk Mrica masih di atas 224 meter, yang merupakan batas aman, tetapi dengan terus berkurangnya air mengakibatkan PLTA tidak bisa mengoperasikan ketiga generatornya. Pada musim kemarau seperti ini, turbin tidak dioperasikan terus-menerus, tetapi hanya dioperasikan pada saat beban puncak, yakni pukul 17.00 hingga pukul 22.00.

Teguh menambahkan, pengoperasian turbin pembangkit itu pun tergantung permintaan Unit Pengatur Beban (UPB) Area III yang berada di Ungaran, Jateng. Dalam kondisi volume air waduk yang terbatas seperti saat ini, UBP Mrica harus pandai memanfaatkan air waduk, karena bukan tidak mungkin PLTA Mrica akan diminta bantuannya untuk memacu produksi energi listrik.

Dengan energi listrik di jaringan interkoneksi Jamali yang beberapa kali krisis, peran UBP Mrica dengan 11 sub-unit PLTA, tidak terlalu signifikan untuk membantu menyuplai jaringan interkoneksi Jamali. Apalagi, setelah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangandri, Kabupaten Cilacap, yang berkapasitas 600 MW, masuk ke jaringan interkoneksi Jamali, peran PLTA Mrica seperti tidak terlihat.

Namun, persoalannya bukan apakah PLTA Pangsar Soedirman dapat beroperasi secara maksimal atau tidak. Permasalahannya adalah akankah pengorbanan ribuan penduduk yang kehilangan sawah, rumah, tanah pekarangan, atau Pekab Banjarnegara yang kehilangan 32 desa di tujuh kecamatan menjadi sia-sia, terutama jika waduk PLTA itu tidak berfungsi lagi akibat erosi dan sedimentasi? (HINDHARYOEN NTS)

PLTA Jelok yang dioperasikan sejak tahun 1938 memiliki empat mesin pembangkit, masing-masing menghasilkan daya listrik 5 megawatt (MW). Untuk menghasilkan daya listrik maksimal, setidaknya dibutuhkan debit air 16 meter kubik per detik untuk menggerakkan keempat mesin pembangkit tersebut.

Sejak awal Agustus debit air Sungai Tuntang hanya berkisar 5,83 meter kubik per detik sehingga PLTA Jelok hanya mengoperasikan dua mesin pembangkit dan menghasilkan daya listrik 7,5 MW. Pada pertengahan Agustus debit air terus menyusut hingga 3,34 meter per detik sehingga PLTA Jelok hanya mengoperasikan satu mesin pembangkit yang menghasilkan daya listrik 4 MW.

"Sebenarnya satu mesin pembangkit ini bisa maksimal menghasilkan daya listrik hingga 5 MW jika debit airnya mencapai empat meter kubik per detik. Dengan kondisi (menurunnya debit air) ini, kami harus benar-benar berhemat karena pengguna air Sungai Tuntang juga banyak, antara lain PDAM, petani, dan nelayan. Hingga kini, kami baru bisa mempertahankan elevasi Rawapening setinggi 461,20 meter di atas permukaan laut (mdpl). Padahal, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Jawa Tengah (Jateng) yang berkompeten mengatur penggunaan air Sungai Tuntang sudah meminta agar elevasi dipertahankan setinggi 461,67 mdpl," tutur Sriyoto, Supervisor Senior PLTA Jelok.

Ia menambahkan, kondisi PLTA Jelok saat ini cukup kritis. Jika kekeringan terus berlanjut

dan elevasi air Sungai Tuntang mencapai titik *minimum operation level* (MOL), yakni 460,50 mdpl, mesin pembangkit terpaksa tidak beroperasi. Menilik penurunan elevasi air Sungai Tuntang yang per hari mencapai satu sentimeter, maka diperkirakan titik MOL terjadi pada dua bulan mendatang.

Kondisi kritis juga dialami PLTA Timo yang memanfaatkan limpasan air dari PLTA Jelok untuk menggerakkan mesin pembangkit listrik. Tiga mesin pembangkit yang ada di PLTA Timo bisa menghasilkan daya maksimal 12 MW. Untuk menghasilkan daya maksimal tersebut dibutuhkan aliran air dengan debit 15,3 meter kubik per detik. Penurunan debit air sungai pada musim kemarau ini membuat PLTA Timo hanya bisa mengoperasikan satu mesin pembangkit listrik.

"Setelah kolam tandon harian dikuras awal Agustus lalu, PLTA Timo sempat mengoperasikan dua mesin pembangkit dan hanya menghasilkan daya listrik maksimal 7 MW. Sejak pertengahan Agustus, debit air hanya berkisar 3,5 meter-4 meter kubik per detik sehingga PLTA Timo hanya mengoperasikan satu mesin pembangkit dan hanya menghasilkan daya listrik maksimal 3 MW," ujar Supervisor Pemeliharaan PLTA Timo, Mahsun.

Penurunan elevasi Rawapening dan debit air Sungai Tuntang ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga awal November mendatang. Kepala Balai Meteorologi dan Geofisika (BMG) Jateng, Widada, saat dihubungi Kamis (14/9) lalu, menyatakan, hujan di wilayah Semarang dan sekitarnya, termasuk kawasan Rawapening, diperkirakan baru terjadi awal November. Seperti siklus tahunan sebelumnya, Juni-Oktober, kecil kemungkinan terjadi hujan.

Nasib di Wonogiri

Nasib serupa juga dialami PLTA Wonogiri. Saat ini, dari dua

mesin pembangkit yang ada di PLTA itu, hanya satu unit yang beroperasi dengan produksi 12 MW. Itu pun diperkirakan tidak akan lama. Jika tidak kunjung turun hujan, masa operasinya diperkirakan hanya akan tinggal 36 hari. Elevasi air waduk kini 131,80 meter dengan penurunan tiap harinya mencapai lima sentimeter. Dengan demikian, dalam waktu 36 hari ke depan elevasi hanya tinggal 130 meter.

Padahal pada posisi itu, meskipun tampaknya air masih berlimpah di dalam waduk, air waduk sudah tidak bisa dimanfaatkan. "Lihat saja di beberapa bagian sudah tampak sedimentasinya. Sebentar lagi airnya sudah bercampur dengan tanah, menjadi lumpur," kata Agus, pengawas bendungan dari Proyek Pengendalian Banjir Bengawan Solo, Kamis lalu.

PLTA Wonogiri, menurut Humas PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) PLTA Mrica, Gunawan, mampu memproduksi 24 MW. Tetapi, saat musim kemarau sering kali hanya satu mesin pembangkit saja yang dioperasikan sehingga produksi turun menjadi 12 MW. Mengingat produksi PLTA Wonogiri kecil, kondisi ini tak sampai mengganggu kelistrikan di Jateng.

Meski demikian, produksi yang terhenti akan menjadi beban bagi PLTA lainnya untuk mengganti suplai yang terhenti. Biasanya, PLTA Mrica yang mengganti kebutuhan listrik yang semula dari PLTA Wonogiri. "Sebagai ganti produksi yang hilang dari PLTA Wonogiri, akan diambilkan dari pasokan PLTA Mrica atau PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) di Cilacap," ungkap Gunawan.

PLTA yang sangat bergantung pada air tentu saja tidak bisa beroperasi jika tidak ada air. Namun, kenyataan yang terjadi cukup menyedihkan mengingat sebenarnya sering kali masih tersedia cukup air, tetapi karena sedimentasi yang tinggi, air berubah menjadi berlumpur se-

hingga tidak bisa dimanfaatkan. Air seperti itu bisa merusak mesin pembangkit listrik.

Diperparah

Masalah sedimentasi bukan baru sekarang ini terjadi. Waduk Gajahmungkur, Waduk Kedungombo, dan waduk lain yang dibangun di atas lahan bekas permukiman berpotensi menimbulkan sedimentasi. "Tanah bekas permukiman gembur, mudah terjadi sedimentasi," kata Agus.

Laju sedimentasi semakin tinggi jika di areal waduk dibuat lahan pasang surut untuk bercocok tanam. Palawija dan padi adalah beberapa jenis yang ditanam di lahan pasang surut di Gajahmungkur. Kondisi ini diperparah dengan adanya penebangan hutan—yang masuk jalur sabuk hijau (*greenbelt*) di sekitar waduk. Air hujan pasti membawa material tanah dari hutan gundul masuk ke dalam waduk tanpa bisa dicegah.

Petugas pengawas jelas tidak mampu mengatasi masalah seperti itu. Setiap petugas, kata Agus, diberi tugas mengawasi tiga hektar-lima hektar lahan di sekitar waduk. Pada malam hari, tugas semakin terasa sulit karena medannya begitu luas dan berhutan. Memberi pemahaman kepada penduduk sudah kerap dilakukan, tetapi masih sering ditemukan kasus pencurian kayu karena tekanan ekonomi yang dialami warga.

Sebenarnya ada cara lain untuk mengatasi sedimentasi secara cepat, namun berbiaya sangat mahal, yakni pengerukan. Karena itu, sejak dibangun, baru sekali pengerukan dilakukan di Waduk Gajahmungkur. "Biaya sekali pengerukan cukup untuk membuat satu dam baru," ucap Agus.

Memberi pemahaman dan alternatif sumber ekonomi kepada warga merupakan salah satu upaya pencegahan yang efektif dalam mencegah laju sedimentasi.

(C WAHYU HARYO PS/
SRI REJEKI)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 22											TAHUN 2006																			

Nongsa Harapkan Listrik

Tanjung Gundak yang Dekat Pembangkit Panaran Pun Gelap

BATAM, KOMPAS – Warga Nongsa Pantai, Kecamatan Nongsa, Batam, saat ini belum mendapatkan pelayanan PT PLN. Biaya penyambungan listrik di perkampungan itu, sebesar Rp 638 juta, kalau dibebankan kepada sekitar 70 keluarga dinilai terlalu mahal. Pemerintah diharapkan memberi perhatian khusus terhadap masalah ini.

Koordinator Lapangan Lembaga Swadaya Masyarakat Kesatuan Aksi Anak Negeri (TUAN), Firman, dan Ketua Koordinator TUAN, Burhanuridin, mengemukakan hal tersebut di Batam, Minggu (17/9). "Berdasarkan surat yang diperoleh, biaya penyambungan listrik untuk Nongsa Pantai mencapai Rp 638 juta. Kalau semuanya dibebankan kepada warga, berarti setiap keluarga harus mengeluarkan biaya

Rp 9,1 juta," kata Firman menjelaskan.

Perkampungan itu tak jauh dari lokasi pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri (PM) Singapura dan PM Australia Agustus lalu.

Firman lebih jauh merinci, biaya Rp 638 juta itu meliputi pengadaan material, pemasangan atau penyambungan listrik (Rp 461,77 juta), dan prabayar yang terdiri dari pembayaran tarif per kWh

Rp 1.744 serta biaya energi minimum Rp 816.192 selama tiga bulan sebesar Rp 176,29 juta.

Sangat memberatkan

Burhanuridin menambahkan, biaya penyambungan aliran listrik sebesar itu dirasakan sangat memberatkan warga karena sebagian besar dari mereka berpendapatan rendah. "Nongsa itu juga merupakan kawasan wisata. Masyarakat membutuhkan listrik untuk kegiatan itu," ujarnya.

Ia menyayangkan sikap Pemerintah Kota Batam, Otorita Batam, dan PLN Batam yang tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat di perkampungan.

Saat ini, menurut Burhanuridin, bukan hanya Nongsa Pantai yang belum terlayani PT PLN. "Masih banyak perkampungan

yang belum dialiri listrik. Misalnya di Tanjung Gundak, yang bahkan dekat dengan pembangkit listrik Panaran," katanya.

Menurut Firman, masyarakat Nongsa Pantai sebenarnya sudah mengajukan permohonan pemasangan aliran listrik sejak tahun 2002. Namun, hingga kini permohonan itu belum dipenuhi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris PT PLN Batam Ida Bagus Mardawa mengatakan, pada prinsipnya PLN selalu memerhatikan permintaan penyambungan aliran listrik masyarakat. Namun, pihak PLN juga perlu mempertimbangkan lokasi yang akan dialiri listrik, mengingat anggaran untuk hal itu terbatas.

"Kalau jaringan terlalu jauh, tak mungkin dibangun," kata Mardawa menambahkan. (FER)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2006

Indonesia Power Akan Bangun PLTGU 200 MW

PT Indonesia Power, anak perusahaan PT PLN, akhir September ini akan menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan perusahaan Singapura untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) berkapasitas 2 x 100 megawatt (MW) di Batam. MOU itu akan ditandatangani bersama dengan perusahaan listrik Singapura, Tuas Power, sebagai pihak pembeli energi listrik dari pembangkit gas tersebut. Demikian dikatakan Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha PT Indonesia Power Bambang Isti di Bandung, Minggu (17/9). Energi listrik yang dihasilkan dari PLTGU Batam nantinya akan dialirkan ke Singapura melalui kabel bawah laut. (ANTARA/GUN)